

Memahami, Menyuarakan, dan Mengatasi Permasalahan Perempuan dalam Ruang Terbatas pada Masa Orde Baru Sebelum Reformasi 1998

Voicing Women's Issues in the Limited Space of Masa Orde Baru Pre-1998 Reformation

Sita Aripurnami

Women Research Institute, Jakarta Selatan, Indonesia

sita@jimsch.org

Kronologi Naskah: diterima 4 Juli 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

This article explains the experience of voicing women's injustices in Indonesia during the New Order before the 1998 Reformation. It begins with the chronology of the author's encounter on women's issues and feminist perspective. These efforts were challenged by the State during the New Order. The State challenged those in several forms, such as interrogation, terror, and threats. This article analyzes women's struggles using the concept of patriarchy from Walby and the politics of differentiation from Young. It also explains why the failure to fulfill one form of injustice for women, namely reproductive rights in the family planning program in Indonesia, became a point of contention between women's issue activists and the State. Even though they faced challenges from the State, as long as the sense of injustice is still real, efforts to overcome the problem will continue to be carried out by women activists.

Keywords: feminism, women's reproductive rights, New Order in Indonesia, patriarchy, politics of differentiation

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai pengalaman menyuarakan ketidakadilan yang dihadapi perempuan di Indonesia pada masa Orde Baru sebelum masa Reformasi 1998. Diawali dengan kronologi persinggungan penulis dengan permasalahan-permasalahan perempuan dan perkenalannya dengan perspektif feminis yang dipercayai sebagai nilai kehidupannya. Upaya menyuarakan ketidakadilan ini mendapatkan tantangan dari Negara pada masa Orde Baru. Suara yang berbeda dengan Negara mendapatkan tantangan melalui pemanggilan dan interogasi serta pembungkaman hingga memperoleh teror dan ancaman. Artikel ini mengulas mengenai mengapa permasalahan ketidakadilan bagi perempuan yang disuarakan itu ditentang oleh Negara dengan menggunakan antara lain konsep teori patriarki dari Walby, konsep politik diferensiasi dari Young. Juga, dijelaskan mengapa tidak terpenuhinya salah satu bentuk ketidakadilan bagi perempuan yaitu hak-hak reproduksi dalam program KB di Indonesia, menjadi pokok yang dipertentangkan antara pegiat isu perempuan dan Negara. Sekalipun mengalami tantangan cukup besar dari Negara, selama rasa ketidakadilan masih nyata, maka upaya mengatasi permasalahan akan tetap dijalankan oleh para aktivis perempuan.

Kata kunci: feminisme, hak-hak reproduksi perempuan, Orde Baru di Indonesia, patriarki, politik diferensiasi

Pendahuluan

Tahun 2025 ini menjadi tahun peringatan tentang berbagai hal di jagat pergerakan organisasi perempuan di Indonesia. Pada tahun ini, misalnya saja, Yayasan Kalyanamitra memasuki tahun ke-40 bergerak menjadi sahabat perempuan, Asosiasi LBH APIK telah berusia 30 tahun bekerja memperjuangkan keadilan bagi perempuan, dan Women Research Institute tanpa terasa sudah 23 tahun menekuni riset tentang permasalahan yang dihadapi perempuan serta peningkatan kapasitas bagi mereka.

Ingatan saya pun menjelajah seakan memasuki lorong waktu menghadapi kenyataan bahwa saya telah memasuki situasi sebagaimana para nenek

kami melakukan upaya untuk menjawab persoalan-persoalan perempuan pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Tulisan ini menceritakan bagaimana tantangan yang saya hadapi ketika masa Orde Baru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Masa Orde Baru di Indonesia merupakan periode ketika negara secara sistematis membatasi ruang gerak politik, sosial, dan budaya masyarakat sipil, termasuk gerakan perempuan. Dalam konteks pembangunan yang sentralistik dan otoriter, suara-suara kritis perempuan yang menyoroti ketimpangan gender, kekerasan seksual, dan pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi kerap dibungkam melalui berbagai bentuk represi, mulai dari sensor hingga interogasi dan

teror. Dalam situasi seperti inilah, keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan menjadi tindakan politik yang bermakna dan penuh risiko.

Tulisan ini berangkat dari pengalaman personal penulis sebagai bagian dari gerakan perempuan Indonesia yang tumbuh dan berjuang dalam kondisi represif pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi 1998. Melalui pendekatan autoetnografi feminis, artikel ini tidak hanya merekam peristiwa-peristiwa yang dialami penulis, tetapi juga memaknai pengalaman tersebut sebagai cerminan dari relasi kuasa antara negara, perempuan, dan tubuhnya. Dari perjumpaan awal dengan ketimpangan yang dialami oleh asisten rumah tangga, hingga keterlibatan dalam kampanye anti-perkosaan dan advokasi hak-hak reproduksi, penulis menghadirkan refleksi mendalam atas bagaimana perjuangan perempuan selalu menegosiasikan ruangnya dalam sistem yang menindas.

Dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby (1991) dan politik diferensiasi Iris Marion Young (1990), artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana negara membingkai kebijakan reproduksi bukan sebagai pemenuhan hak individu, tetapi sebagai instrumen politik pengendalian populasi. Narasi ini bukan hanya catatan sejarah pribadi, melainkan bagian dari upaya kolektif gerakan perempuan untuk mendokumentasikan dan menantang ketidakadilan struktural yang terus berlangsung.

Metode Penelitian

Artikel ini mengadopsi pendekatan autoetnografi feminis, yaitu pengalaman pribadi penulis lebih dari sekedar cerita individu dan lebih menggarisbawahi narasi yang terlibat secara politik. Metode ini dirasa tepat untuk memahami dan menantang ketidakadilan sistemik yang dihadapi perempuan di bawah rezim Orde Baru Indonesia. Autoetnografi feminis memungkinkan penulis untuk merefleksikan pengalaman sebagai aktivis hak-hak perempuan sambil secara kritis memeriksa peran dirinya dalam mengekspos dan mengatasi ketidakadilan berbasis gender, terutama yang menyangkut hak reproduksi dan kontrol negara atas tubuh perempuan.

Merujuk pada teori sudut pandang feminis (*feminist standpoint*), pendekatan ini mengakui bahwa individu yang terpinggirkan, terutama perempuan yang mengalami penindasan secara langsung, memiliki posisi epistemik yang unik untuk menginterogasi struktur kekuasaan dominan (Harding 2004; Smith

1999). Dengan mengedepankan tubuh, emosi, dan memori sebagai sumber pengetahuan, metodologi ini selaras dengan proposisi Sarah Ahmed (2017) bahwa feminisme sering dimulai dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dan respons personal seperti itu dapat mengarah pada kesadaran politik.

Narasi autoetnografi, ini kritis dan partisipatif, bukan hanya deskriptif. Ini menantang dan mempersoalkan penghapusan suara dan pendapat yang berbeda oleh negara dengan menegaskan kembali memori yang terwujud sebagai perlawanan. Pengalaman penulis tentang interogasi, sensor, dan pengawasan negara ditafsirkan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby (1991) dan teori politik perbedaan Iris Marion Young (1990). Kerangka kerja ini memungkinkan pembacaan feminis tentang bagaimana kebijakan negara tentang keluarga berencana beroperasi sebagai instrumen pemaksaan, memperkuat kontrol patriarki atas pilihan reproduksi perempuan sambil melayani tujuan ekonomi dan politik yang lebih luas.

Sebagai metode feminis, autoetnografi memosisikan penulis sebagai subjek dan pengamat, yang ingatan dan refleksinya merupakan bagian dari sejarah kolektif gerakan feminis Indonesia. Prosesnya diambil dari tradisi yang diartikulasikan oleh Ellis dan Bochner (2000) yang menekankan kekuatan bercerita dalam menangkap persimpangan pribadi dan politik. Hal ini memungkinkan melihat autoetnografi sebagai bentuk aktivisme, ketika menulis menjadi praktik kebebasan.

Dengan memadukan cerita pribadi, kenangan bersama, dan wawasan kritis, pendekatan ini menghidupkan sejarah feminis dari akar ke atas dan membantu memperkuat suara yang telah dibungkam oleh rezim otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa memori bukan hanya tempat trauma tetapi juga ruang yang kuat untuk perlawanan dan perubahan.

Persinggungan dengan Persoalan Perempuan & Feminisme

Perkenalan pertama saya dengan persoalan yang dialami perempuan bermula ketika saya melakukan riset untuk skripsi sarjana pada Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia pada tahun 1983, mengenai pola aspirasi asisten rumah tangga remaja perempuan di Jakarta. Riset yang dilakukan pada awalnya sebagai tugas akademik agar dapat menyelesaikan studi, dalam perjalanan melaksanakan riset menjadi pembuka mata bagi saya tentang persoalan perempuan.

Serangkaian wawancara yang dilakukan kepada para asisten rumah tangga itu, membuka mata saya akan sebuah situasi kerja yang dihadapi perempuan. Sebagai asisten rumah tangga, ia tidak mempunyai sebuah standar waktu kerja. Waktu kerjanya sangat tergantung dari tempat atau pada siapa perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Apabila mendapatkan majikan yang baik hati, maka jam kerja yang dijalani akan sangat manusiawi. ART akan mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan setelah waktu makan malam atau sekitar pukul 20.00 sudah dapat beristirahat. Namun, apabila mendapatkan majikan yang kurang memperhatikan situasi dan kondisi kerja asisten rumah tangga, maka asisten rumah tangga dapat bekerja tanpa ada batasan waktu.

Dari riset saat itu, saya mulai melihat bahwa para perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ini adalah perempuan yang harus bekerja agar dapat menghidupi keluarganya di desa asalnya. Namun, waktu kerjanya tidak menentu serta kesejahteraannya pun juga tidak memadai. Tenaga yang dikeluarkan sangat besar atau melelahkan dengan upah dan kesejahteraan yang tidak sebanding dengan lama waktu kerja setiap harinya. Bahkan, kondisi kerjanya bisa tidak aman, dari bisa mengalami perlakuan kasar hingga penganiayaan atau kematian. Riset ini mulai memunculkan pertanyaan bagi saya, mengapa perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga bisa mengalami atau menghadapi persoalan seperti ini.

Keadaan yang saya amati di atas, merupakan titik singgung pertama saya memulai bertanya (dalam diri) mengenai persoalan yang dihadapi perempuan. Keinginan mencari jawab mengapa persoalan perempuan seperti ini bisa ada, membawa saya pada pertemuan dengan beberapa orang perempuan, yang ternyata memiliki keinginan untuk mencari jawab bagi persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan.

Pertemuan ini berlanjut menjadi sebuah hubungan perkawanan, lebih tepatnya persaudaraan, yang mendorong kami mendirikan sebuah organisasi perempuan pada tahun 1985, yang dikenal sebagai Kalyanamitra. Di tempat inilah, saya mengenal feminisme untuk pertama kali. Dari mulai diusik tentang persoalan yang dapat dialami perempuan, lalu dalam usaha memahami hal itu, saya dipertemukan dengan kawan-kawan mencari jawab atas permasalahan perempuan dan feminisme. Hal ini menjadi perspektif saya dalam usaha memahami permasalahan perempuan dan dasar atas segala tindakan saya di kemudian hari.

Persinggungan kedua saya dengan permasalahan perempuan adalah upaya saya dan teman-teman di Kalyanamitra mensosialisasikan pentingnya bagi masyarakat untuk memahami permasalahan perempuan dan melakukan upaya untuk mengatasinya. Saya memilih mensosialisasikan pentingnya mengatasi salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan. Bersama teman-teman Kalyanamitra pada tahun 1989, kami melakukan riset data sekunder mengenai peristiwa perkosaan berdasarkan yang diberitakan oleh media massa.

Dari riset itu, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi perkosaan setiap 5 jam sekali di Indonesia. Hasil riset ini kami luncurkan pada tahun 1990 dan kami canangkan sebagai Kampanye Anti Perkosaan, dengan mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan di Indonesia dan ASEAN untuk mendukung kampanye ini. Bayangan saya, dengan mengajak orang untuk melakukan sesuatu terhadap perkosaan, orang akan setuju melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan perempuan. Ternyata, *jauh panggang dari api*.

Alih-alih mendukung, banyak pihak justru mengatakan bahwa apabila perempuan mengalami perkosaan itu karena kesalahan perempuan yang menjadi korban itu sendiri. Hampir semua mengatakan bahwa itu karena cara berpakaian yang provokatif, menampakkan bagian-bagian tubuh yang semestinya tertutup seperti payudara, pendek atau ketatnya pakaian yang dikenakan, atau mengapa perempuan itu keluar rumah di waktu malam dan berjalan di tempat sepi. Meski kancah perjuangan untuk mengajak berbagai pihak sama-sama memperjuangkan upaya mengurangi permasalahan perempuan tidak mudah dan banyak tantangan, kampanye anti-perkosaan menjadi perekat persaudaraan di antara aktivis dan organisasi perempuan di Indonesia juga di ASEAN untuk mencari prosedur dan mekanisme yang efisien dan tepat untuk mengatasi perkosaan.

Ada pernyataan menarik dari Simone Weil yang dikutip oleh Iris Young tentang perkosaan. *Rape is a terrible caricature of love from which consent is absent. After rape, oppression is the second horror of human existence. It is a terrible caricature of obedience* (Young 1990).

Perkosaan adalah karikatur mengerikan tentang cinta tanpa persetujuan. Setelah perkosaan, penindasan adalah kengerian kedua dalam keberadaan manusia. Penindasan adalah karikatur mengerikan tentang kepatuhan.

Merujuk pada pernyataan Weil yang dikutip Young, maka seyogyanya semua pihak bisa melihat bahwa perkosaan bukanlah sebuah tindakan atas nama cinta, melainkan sebuah tindakan di luar kehendak atau pemaksaan dengan menggunakan atas nama cinta.

Lebih lanjut, sebagaimana yang dikatakan Young dalam Heldke & O'Connor (2004) bahwa kekerasan dan perkosaan adalah kekerasan, merupakan bentuk penindasan yang paling nyata (Heldke & O'Connor 2004). Kekerasan adalah serangan-serangan yang tidak selalu membutuhkan motif, tetapi dimaksudkan untuk merusak, mempermalukan, atau menghancurkan seseorang. Perkosaan merupakan sebuah pelanggaran hak perempuan atas tubuhnya. Untuk itu, kita semua perlu melawan tindakan perkosaan dan menghentikannya.

Saya mulai kenal dengan permasalahan perempuan melalui riset mengenai asisten rumah tangga, lalu diperkenalkan dengan feminisme melalui Kalyanamitra. Selanjutnya, menggalang kerja bersama mengampanyekan gerakan anti-perkosaan, membuat saya semakin merasa ingin selalu bekerja mengatasi permasalahan perempuan dan memperkuat posisi mereka. Di titik ini, kiprah kerja dan aktivitas saya bersama Kalyanamitra semakin intensif menggali dan menyuarakan permasalahan yang dialami perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1991, saya mulai memperhatikan secara sungguh-sungguh mengenai program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Berangkat dari melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan program KB di desa tempat salah satu kakak ipar saya menjadi lurah di Jawa Tengah, mendorong saya untuk mengajak Kalyanamitra dan Wardah Hafidz melakukan riset mengenai pelaksanaan program KB di salah satu desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 1991. Data yang terungkap sungguh mengganggu hati nurani saya. Masih terpatери kuat dalam ingatan saya, seolah suara itu masih terdengar jelas dalam telinga saya,

“..pelaksanaan program KB adalah tanggung jawab kita semua, khususnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Supaya Indonesia bisa mencapai masyarakat adil makmur, kita harus melaksanakan program ini” (Kalyanamitra 1992).

Pernyataan ini diucapkan oleh salah seorang perwira tentara Indonesia pada pelaksanaan program KB yang dinamakan program Safari KB di salah satu desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat, lokasi riset Kalyanamitra.

Permasalahan pelaksanaan program KB ini, menjadi perhatian saya sepanjang tahun 1991 hingga 1997. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang karena berangkat dari sebuah keinginan untuk memahami, lalu menyuarakan, dan kemudian menawarkan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan.

Terpinggirkannya Pemenuhan Hak-hak Reproduksi Perempuan

Sebagaimana yang dipelajari dari sejarah gerakan perempuan terutama di Amerika Serikat, sosialisasi pentingnya mengendalikan kelahiran dapat ditelusuri sejak tahun 1840. Selama beberapa abad, gerakan perempuan di belahan dunia Barat memperjuangkan penemuan pil dan alat-alat kontrasepsi agar perempuan dapat menentukan sendiri waktu kapan dirinya ingin menjalankan hak reproduksinya. Sekalipun demikian, penggunaan alat-alat kontrasepsi di dunia Barat juga selalu terkait dengan kebutuhan politik dan ekonomi (Gordon 1994).

Mendengar pernyataan dari salah seorang perwira tentara pada riset Kalyanamitra pada tahun 1991 itu menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi di Indonesia tidak dimaksudkan untuk melayani pilihan hak pribadi reproduksi perempuan. Seperti yang diperlihatkan dalam pelaksanaan program KB itu bahwa alat-alat kontrasepsi digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Di dalam program pembangunan, program KB dilihat sebagai alat negara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Negara, memandang dirinya mempunyai hak untuk menentukan pilihan pribadi warganya, termasuk penggunaan kontrasepsi. Hal ini berbeda dengan di dunia Barat yang tidak mempunyai kendali atas penggunaan kontrasepsi warganya.

Di titik ini, saya menjadi sadar mengapa minat saya memahami persoalan perempuan dalam hal ini, pemenuhan hak reproduksinya untuk dapat memilih penggunaan alat kontrasepsi (di Indonesia disebut alat KB), dianggap mengganggu program pembangunan, oleh karenanya mengganggu pemerintah – sehingga dianggap mempertanyakan hak negara. Ketika hasil riset Kalyanamitra mengenai pelaksanaan program KB dituliskan menjadi sebuah makalah yang didistribusikan pada sebuah konferensi internasional di Washington DC pada tahun 1991 (Hafidz et al. 1991), sejak saat itulah gerak saya mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan atau pemerintah.

Padapanggilan pertama, saya diminta oleh Bappenas, pada saat itu, untuk 'mempertanggungjawabkan' makalah yang dibuat berdasarkan riset Kalyanamitra. Kami, dianggap telah menjelek-jelekkan Indonesia di dunia internasional. Saya merespons dengan mengatakan bahwa bila menjelek-jelekkan, saya mengatakan hal yang tidak sebenarnya terjadi atau menyebarkan kebohongan. Saya menunjukkan bahwa kami mengatakan sesuatu berdasarkan data riset dan pelaksanaan program KB di dua wilayah riset. Kita menunjukkan bahwa pelaksanaannya menggunakan praktik yang koersif yaitu Safari KB. Para perempuan dijemput militer untuk menjadi akseptor KB. Alat kontrasepsinya pun tidak ada pilihan lain, selain susuk KB yang dikeluarkan oleh Nordplant, perusahaan farmasi, yang memperkenalkan metode jangka panjang menahan terjadinya kehamilan selama 5 tahun. Susuk KB terdiri dari enam jarum yang disisipkan di bawah kulit. Setiap jarumnya berisi hormon yang akan mengatur agar tidak terjadi kehamilan. Susuk KB ini menjadi salah satu yang dimasukkan dalam hutang luar negeri yang diberikan untuk program pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru.

Kali kedua, saya bersama teman-teman yang hadir atau makalahnya didistribusikan pada Konferensi di Washington DC, dipanggil oleh Menteri Sekretaris Kabinet pada masa itu, Bapak Moerdiono. Kami diminta hadir pada pukul 09.00 pagi di kantor Menteri Sekretaris Kabinet. Kami dipanggil satu per satu, diminta untuk 'mempertanggungjawabkan' makalah dan apa yang kita sampaikan pada Konferensi itu.

Ketika tiba pada giliran saya (dan saya yang terakhir), jam sudah menunjukkan pukul 19.00. Pertanyaan yang diajukan bapak Menteri serupa dengan apa yang ditanyakan oleh para bapak pejabat Bappenas. Mengapa saya menjelek-jelekkan Indonesia di dunia Internasional. Saya pun menjawab seperti yang saya sampaikan kepada Bappenas. Seperti ingin memastikan jawaban saya, pertanyaan ini diulang beberapa kali dan saya jawab dengan jawaban yang sama. Tampaknya beliau ingin menguji konsistensi jawaban saya. Ini berlangsung hingga pukul 21.00. Semua yang dipanggil, ketika salah satu dari kami sedang ditanya, tetap menunggu di ruangan lain. Saya tidak tahu, apakah hal ini yang 'menyelamatkan' saya sehingga proses menanyakan dihentikan, ketika bapak Menteri menyadari bahwa baju atasan saya basah. Beliau bertanya, apakah saudara Sita mempunyai bayi saat ini? Saya katakan, iya pak. Kalau begitu dicukupkan sampai

di sini pertanyaannya. Kami pun semua kembali pulang ke rumah masing-masing.

Beberapa waktu kemudian, kawan-kawan dari YLBHI mengatakan bahwa semua yang hari itu dipanggil bapak Menteri Sekretaris Negara, yang lain dilarang ke luar negeri untuk satu tahun, kecuali Sita Aripurnami. Hingga sekarang, hal ini masih menjadi misteri bagi saya. Mungkin karena pertanyaannya adalah apakah mempunyai bayi dan masih menyusui. Hal ini yang membedakan perlakuan kepada saya. Mungkin.

Ketiga, setelah mendapat panggilan dua kali dari pemerintah, kali ini saya mendapat panggilan ketiga untuk datang ke Markas Besar TNI Cilangkap. Saya datang dengan didampingi oleh Asmara Nababan, ketika itu direktur INFID dan Abdul Hakim G. Nusantara, kala itu ketua YLBHI. Kedua orang pendamping ini, mengatakan bahwa saya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan. Mereka berdua meminta persetujuan saya agar mereka berdua yang menjelaskan konteks mengapa makalah saya didistribusikan pada konferensi di Washington DC.

Di Cilangkap, saya sudah ditunggu oleh bapak Harsudiono Hartas dan bapak Agum Gumelar. Pada tahun itu, bapak Harsudiono Hartas menjabat sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR RI, sedangkan bapak Agum Gumelar menjabat sebagai Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jayakarta. Sekali lagi, saya diminta untuk 'mempertanggungjawabkan' makalah yang didistribusikan pada konferensi di Washington DC. Saya ditanya, mengapa saya dan kawan-kawan yang menuliskan makalah itu, menyebutkan bahwa program KB di Indonesia adalah pemaksaan dan melanggar hak asasi manusia.

Masih teringat dengan jelas bapak Harsudiono Hartas mengatakan kepada saya, bahwa apa salahnya melakukan pemaksaan. Beliau menganalogikan dengan situasi ketika mengajarkan anak kita untuk gosok gigi pertama kali, bukankah harus dipaksakan. Pemaksaan untuk kebaikan, tidak apa-apa, demikian ujar beliau. Sementara bapak Agum Gumelar secara persisten menanyakan terus sejak pukul 09.00 hingga pukul 18.00, mengapa menjelekkan program pemerintah ke dunia internasional. Saya pun secara konsisten mengatakan bahwa paparan dalam makalah itu tidak diarahkan pada program KB di Indonesia. Melainkan, lebih pada bagaimana program ini dikendalikan secara politik oleh negara untuk menjalankan praktik-praktiknya yang memaksa perempuan.

Sekali lagi, saya merasa 'diselamatkan' oleh situasi saya yang masih menyusui anak saya yang kedua. Ketika waktu menunjukkan pukul 19.00, bapak Harsudiono Hartas menyadari bahwa baju atasan saya sudah basah pada bagian dada. Beliau lalu menanyakan apakah saya sedang masa memberi ASI. Ketika saya menjawab, bahwa betul saya masih memberikan ASI. Pertemuan lalu ditutup dan dinyatakan selesai.

Menjadi jelas bagi saya, bahwa hak reproduksi perempuan bukan dianggap sebagai pemenuhan hak individu perempuan, melainkan menjadi kepentingan penguasa untuk mengaturnya. Saya menjadi sadar bahwa hal yang saya 'perjuangkan' ini dianggap 'mengganggu' pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Namun, mengalami pemanggilan hingga tiga kali oleh 'penguasa' justru membuat saya memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik-praktik koersif oleh negara pada pemenuhan hak perempuan. Muncul pertanyaan yang mengganggu saya: apa hubungan kuasa yang melandasi penggunaan alat kontrasepsi? Bagaimana hak reproduksi perempuan diambil alih oleh negara?

Memahami, Menyuarakan, dan Mengatasi Permasalahan Perempuan

Berangkat dari keinginan untuk lebih memahami persoalan perempuan, persinggungan saya dalam proses memahami, mendorong saya terlibat lebih jauh dalam menyuarakan persoalan-persoalan perempuan.

Berkecimpung dalam kerja memperkuat hak-hak perempuan membuat saya melihat lebih jauh bahwa persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia terkait hak reproduksi bukan karena perempuan tidak mempunyai akses pada alat-alat kontrasepsi. Negara, dalam hal ini, pemerintahan Orde Baru, memberikan alat-alat itu kepada para perempuan. Persoalannya, kebijakan Negara dalam hal pemberian alat kontrasepsi atau program KB kurang memenuhi kriteria kesejahteraan dan penghargaan pada individu perempuan. Namun, kebijakan KB lebih melayani tujuan politik ekonomi Negara. Bagi Negara, hak reproduksi perempuan adalah variabel pembangunan yang bisa dikesampingkan sesuka hati demi tujuan politik ekonomi.

Pada tataran personal, saya melihat bahwa KB adalah sebuah cara yang sejarahnya diciptakan untuk membantu perempuan dapat mengatur kapan

dirinya mau menggunakan fungsi reproduksinya, mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Jadi, KB adalah cara untuk mengendalikan kehamilan dan kelahiran. Apabila menggunakan bahasa Inggris menjadi lebih jelas KB itu artinya *birth control*. Namun, melihat pada respons Negara terhadap temuan hasil riset mengenai pelaksanaan KB pada beberapa tempat di Indonesia, tampak bahwa KB bisa digunakan sebagai cara untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk. Dalam bahasa Inggris KB oleh Negara dipandang sebagai *population control*.

Manakala KB diartikan sebagai *birth control*, KB adalah pemenuhan hak individu untuk mengatur hak dan kesehatan reproduksinya. Namun, apabila KB diartikan sebagai *population control*, KB diartikan sebagai hak Negara untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan melakukan intervensi pengendalian melalui kontrol terhadap fungsi reproduksi individual perempuan secara massal atau kolektif. Temuan hasil riset yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa hak reproduksi individu perempuan telah diambil alih oleh Negara menjadi hak Negara untuk melakukan *population control*. Bagi saya, pembajakan hak reproduksi individual perempuan oleh Negara adalah sebuah tindakan pelanggaran pada hak individual perempuan. Perempuan-perempuan menjadi akseptor KB bukan karena pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hak reproduksinya.

Bagi saya, KB seyogianya merupakan tawaran pilihan yang dapat diambil para individual perempuan untuk kapan dan menggunakan metode KB ketika hendak memenuhi hak reproduksinya dengan sehat dan sadar. Sebagian besar perempuan di Indonesia, pada masa Orde Baru menjadi akseptor KB bukan atas dasar pilihan sadar untuk memenuhi kebutuhan fungsi reproduksinya, melainkan diwajibkan oleh Negara untuk menjadi akseptor KB. Di sinilah letak persoalannya. Bagi saya, semestinya KB membebaskan dan bukan menjadi alat kendali pada perempuan.

Untuk dapat menjadi pemenuhan hak reproduksi individual perempuan, maka KB perlu diinformasikan secara baik dan benar mengenai apa kelebihan dan kelemahan masing-masing alat KB. Apakah efek samping yang akan dialami oleh perempuan bila menggunakan alat KB tertentu. Saya diuntungkan karena dapat memiliki akses informasi yang cukup sehingga dapat memilih alat-alat KB apa yang baik digunakan. KB menjadi sebuah cara yang dapat membantu saya sebagai perempuan dalam memperoleh hak serta kesehatan reproduksi.

Maternitas adalah salah satu dari pemenuhan hak reproduksi bagi perempuan yang memilih menjalankan fungsi maternitasnya. Kurangnya informasi yang benar dan memadai pada pemenuhan hak reproduksi adalah persoalan yang dominan terasa pada masa Orde Baru. Itu sebabnya, sebagai bagian dari organisasi perempuan, jaringan kerja berbagai organisasi, dan pegiat isu perempuan, terbentuklah sebuah Forum Kesehatan Perempuan. Forum ini dikoordinasikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menerbitkan sebuah buku yang merupakan adaptasi dari buku *Our Body Ourselves* versi edisi 1992, yang ditulis oleh The Boston Women's Health Book Collective. Buku versi adaptasi Indonesia, ditulis oleh para pegiat Forum Kesehatan Perempuan, termasuk saya dan beberapa teman di Kalyanamitra. Buku ini menjadi referensi bagi teman-teman di luar Jakarta ketika akan mensosialisasikan pentingnya memelihara kesehatan reproduksi dan memenuhi hak reproduksi. Termasuk di sini adalah kegiatan menyusui.

Pada masa Orde Baru, kegiatan menyusui justru lebih sulit dijalankan oleh para perempuan yang berasal dari kelas yang lebih sejahtera yang bekerja di luar rumah. Pada masa itu, belum ada ruang laktasi dan tempat penyimpanan ASI sehingga cukup banyak persoalan muncul dari ketegangan antara keinginan menyusui dengan keharusan bekerja di lingkup publik. Pada perempuan dari kelas yang kurang beruntung, justru lebih fleksibel karena mereka dapat menyusui sembari bekerja di sawah dan ladang atau ketika berjualan di pasar. Meskipun ketika perempuan dari kelas sosial yang kurang beruntung ini harus bekerja keluar dari desanya menjadi ART di kota atau di luar negeri, mereka harus mengubur keinginan untuk menyusui karena tuntutan harus mencari uang untuk keluarganya. Salah satu yang dilakukan oleh Kalyanamitra yang bergabung dalam Forum Kesehatan Perempuan adalah dengan melakukan sosialisasi, advokasi perlunya dibangun ruang laktasi, dan penyimpanan ASI sehingga perempuan dari kelas sosial mana pun dapat menjalankan fungsi menyusui. Selain itu, ASI yang telah disimpan itu dapat dimanfaatkan bagi bayi-bayi yang oleh karena suatu alasan tidak dapat memperoleh ASI dari ibu kandungnya.

Melihat hal ini, tampak bahwa ada dua hal pokok dalam persoalan hak reproduksi di Indonesia. Pertama adalah patriarki dan yang kedua adalah kelas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Walby, patriarki adalah suatu sistem struktur-struktur dan praktik-praktik ketika kaum laki-laki menguasai, menindas,

dan menghisap kaum perempuan. Selanjutnya, Walby menyebutkan bahwa Negara adalah faktor yang paling penting bagi adanya kondisi-kondisi subordinasi bagi perempuan (Walby 1991). Ini tampaknya berlaku di Indonesia. Dalam hal apa Negara memegang kunci bagi kondisi-kondisi patriarkal ini? Walby menegaskan bahwa hubungan-hubungan patriarkal dapat dipahami dengan konsep kelas, ada dua sistem kelas, satu berdasarkan patriarki dan lainnya pada kapitalisme.

Dua sistem ini tidak saling meniadakan karena bukti menunjukkan bahwa praktik-praktik KB di Indonesia itu dibentuk dan diperkuat dalam konteks masyarakat kapitalis yang berdasarkan patriarki. Ini artinya, perempuan sebagai ibu rumah tangga merupakan satu kelas dan laki-laki sebagai suami merupakan kelas lainnya. Dengan demikian, perempuan sebagai ibu rumah tangga diharuskan menjalani hubungan-hubungan ekonomi dalam ketimpangan sosial yang berbeda dengan yang dialami oleh para suami. Dalam proses inilah, karakter keluarga, kebijakan KB, dan hak reproduksi perempuan mengambil tempatnya. Di dalam proses ini, tampak sentuhan patriarkal dari Negara masuk melalui keluarga hingga pribadi-pribadi perempuan.

Di titik ini, penting untuk menyoroti akses pada kekuasaan dalam sistem stratifikasi yang ada. Bagi kaum perempuan yang aksesnya besar pada sumber daya ekonomi dan politik, aturan-aturan KB di Indonesia pasti lebih bisa ditawar daripada perempuan yang berada di bawah dari stratifikasi sosial. Itulah sebabnya, mengapa perempuan yang berpenghasilan rendah, yang merupakan lapisan terbesar penduduk Indonesia, tidak bisa lain kecuali mengikuti program KB yang dijalankan oleh Negara.

Bekerja di Ruang Terbatas pada Masa Sebelum Reformasi 1998

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa perjuangan tidak berhenti di masa Orde Baru, tetapi berlanjut dengan bentuk tekanan yang berbeda setelah Reformasi. Upaya saya memahami persoalan perempuan dan menyuarakannya juga membuka kesadaran bahwa ada kesenjangan dalam cara persoalan perempuan dipahami. Kesenjangan ini lahir dari perbedaan kepentingan antara para pengambil keputusan dengan mereka yang bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, yang kerap berujung pada berbagai bentuk kontrol, pembatasan, bahkan serangan terhadap gerakan perempuan.

Perbedaan kepentingan itu menurut saya, didasari oleh ketidaktahuan, meski kerap kali karena tidak mau tahu, mengenai apa itu hak-hak perempuan. Beberapa waktu setelah kejadian tiga kali pemanggilan pihak penguasa itu, publikasi organisasi Kalyanamitra, *newsletter* Mitra Media dibredel, dilarang terbit. Menariknya, pembredelan itu hampir bersamaan waktunya dengan dilarang terbitnya majalah Tempo. Pada tahun 1993, Mitra Media dilarang terbit karena artikel “Hancurnya Gerakan Perempuan di Indonesia” yang notabene menjelaskan telah terjadi proses domestikasi peran perempuan pada masa Orde Baru (Suryakusuma 1996). Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa apabila sebuah pendapat yang lain atau berbeda dengan yang dominan dikumandangkan, maka menjadi sah untuk dikendalikan dan langsung saja dilarang terbit. Di titik ini, strategi yang dilakukan untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan adalah dengan melakukan sosialisasi gagasan melalui forum-forum diskusi dan pelatihan-pelatihan bersama organisasi masyarakat sipil di luar Jakarta, bahkan sampai ke luar pulau, seperti ke Sumatra dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, rupanya setelah Orde Baru berganti, pada masa setelah Reformasi, serangan masih terjadi. Pada organisasi saya setelah Kalyanamitra, kantor Women Research Institute dibobol tahun 2006 dan semua *hard disk* komputer di organisasi saya diambil dan uang dari *petty cash* disebar di lantai. Seolah ingin menyampaikan pesan bahwa kami tidak butuh uang, tetapi kita ambil seluruh data kalian. Hal yang menarik, pembobol kantor mengirimkan surat melalui fax dan mengancam saya dan beberapa teman yang sudah mempunyai anak. Apabila kami tidak berhenti menyuarakan keadilan bagi hak-hak perempuan, mereka akan melakukan sesuatu pada anak-anak kami. Mereka sebut nama sekolah anak-anak kami. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka tahu sebagian besar waktunya anak-anak kami berada. Pesan ditulis, seolah dari sebuah kelompok organisasi massa Islam. Bentuk teror atau ancamannya berbeda, namun sekali lagi pesannya tetap sama. Bila kalian, aktivis perempuan berani mempunyai pendapat berbeda dengan penguasa, kami akan ganggu terus.

Periode teror yang saya sampaikan di atas, terjadi lagi setelah waktu Reformasi 1998. Namun, tetap saya sisipkan di sini sebagai gambaran pembanding. Bahwasanya, dalam kurun kapan pun begitu para aktivis perempuan menyuarakan suatu kondisi perempuan di luar yang dominan disuarakan, maka ‘gangguan’ apakah

itu pemanggilan, interogasi, ancaman, teror, sampai pembungkaman akan dilakukan oleh para penguasa.

Apa yang saya alami dan mungkin juga dialami oleh banyak kawan aktivis perempuan terutama pada masa Orde Baru, mengingatkan saya pada pemikiran Young mengenai kritiknya terhadap konsep keadilan tradisional dan menekankan pada pentingnya mengakui perbedaan untuk mencapai keadilan yang lebih merata. Young menawarkan untuk melihat tentang hubungan antara penindasan perempuan dan struktur sosial yang menindas. Young mengatakan bahwa, “keadilan bukan persoalan distribusi individu, melainkan bagaimana memahami struktur sosial yang mendominasi dan menindas” (Young 1990).

Bagi saya, yang paling menarik dari pemikiran Young adalah “tantangan partisipatoris terhadap negara” (Ferguson & Nagel 2009) dan anjurannya mengenai politik diferensiasi yang mengakui dan menghargai perbedaan pendapat kelompok sosial. Young mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kebutuhan, pengalaman yang berbeda, dan keadilan harus mempertimbangkan hal ini.

Young mengutip Simone Weil setuju bahwa *oppression* atau penindasan adalah karikatur yang mengerikan dari kepatuhan manusia. Pemikiran Young di atas berangkat dari pemahaman dia bahwa istilah *oppression* atau penindasan merujuk pada sekumpulan konsep dan kondisi yang kemudian dia bagi menjadi lima kategori: eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan (Young 1990). Kategori-kategori ini tidak saling eksklusif dan bahkan sangat mungkin suatu kelompok tertindas akan menghadapi lebih dari satu bentuk penindasan ini. Secara ringkas, kelima wajah penindasan menurut Iris Young adalah sebagai berikut:

Oppression. Penindasan terjadi ketika orang mengurangi potensi orang lain untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan kata lain, penindasan terjadi ketika orang membuat orang lain kurang manusiawi. Ini bisa berarti memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Namun, bisa juga berarti merampas bahasa, pendidikan, dan kesempatan lain yang mungkin membuat mereka menjadi manusia seutuhnya, baik secara mental maupun fisik.

Exploitation. Biasanya dalam masyarakat kapitalis, kaum “kaya” akhirnya mengeksploitasi kaum “miskin” atas kerja keras mereka. Oleh karena itu, eksploitasi menciptakan sistem yang melanggengkan perbedaan

kelas, membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Marginalization. Tindakan merendahkan atau membatasi sekelompok orang pada status sosial yang lebih rendah atau batas terluar atau pinggiran masyarakat. Secara keseluruhan, ini merupakan proses pengucilan. Marjinalisasi dalam beberapa hal lebih buruk daripada eksploitasi karena masyarakat telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat atau tidak akan menggunakan orang-orang ini, bahkan untuk tenaga kerja. Umumnya, orang-orang terpinggirkan berdasarkan ras.

Powerlessness. Mereka yang tak berdaya didominasi oleh kelas penguasa dan berada dalam posisi untuk menerima perintah dan jarang memiliki hak untuk memberikannya. Beberapa ketidakadilan mendasar yang terkait dengan ketidakberdayaan adalah hambatan untuk mengembangkan kapasitas diri, kurangnya kekuatan dalam pengambilan keputusan, dan paparan terhadap perlakuan tidak hormat karena status yang lebih rendah (Young 1990).

Heldke & O'Connor mengaitkan konsep *powerlessness* dari Young dengan apa yang disebutkan Freire sebagai budaya keheningan dan *conscientization* atau kesadaran (Heldke & O'Connor 2004). Ketidakberdayaan akan cenderung membungkam mereka yang ditindas. Untuk membuatnya bersuara, mereka yang dibungkam perlu menjalani proses penyadaran baik melalui pendidikan, literasi, dan refleksi diri.

Culture of Silence. Ketidakberdayaan inilah yang menciptakan apa yang disebut Freire sebagai Budaya Keheningan. Menurut Freire, orang-orang tertindas menjadi begitu tak berdaya sehingga mereka bahkan tidak membicarakan penindasan yang mereka alami. Jika mereka mencapai tahap penindasan ini, terciptalah budaya mereka dilarang untuk bahkan sekadar membicarakan ketidakadilan yang sedang terjadi. Kaum tertindas dibungkam. Mereka tak bersuara dan tak berkehendak.

Conscientization. Satu-satunya cara untuk melawan ketidakberdayaan dan Budaya Keheningan adalah dengan meraih kesadaran yang lebih besar. Orang-orang tertindas sepanjang sejarah telah meraih pemahaman dan kesadaran yang lebih besar tentang diri mereka sendiri dan orang lain melalui pendidikan, literasi, dan refleksi diri. Melalui tindakan menggunakan suara mereka dan meraih perspektif kritis terhadap para penindas mereka, kaum tertindas mampu membebaskan diri dari indoktrinasi dan (akhirnya)

membebaskan tubuh mereka dari penindasan juga. Freire menyebut proses perolehan kesadaran kritis ini sebagai kesadaran.

Ketidakmampuan bersuara dari mereka yang tertindas ini, juga disebabkan oleh adanya budaya yang dominan dari pihak yang berkuasa dan itu dijadikan dasar untuk melakukan tindakan mengendalikan pihak yang ada di bawah kekuasaannya. Inilah yang disebut oleh Young sebagai Imperialisme Budaya (Young 1990).

Cultural Imperialism. Imperialisme Budaya melibatkan pengambilan budaya kelas penguasa dan menjadikannya sebagai norma. Kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat mengendalikan bagaimana orang-orang dalam masyarakat tersebut menafsirkan dan berkomunikasi.

Violence. Kekerasan mungkin merupakan bentuk penindasan yang paling nyata. Anggota beberapa kelompok hidup dengan kesadaran bahwa mereka harus takut akan serangan acak dan tak beralasan terhadap orang atau properti mereka. Serangan-serangan ini tidak selalu membutuhkan motif, tetapi dimaksudkan untuk merusak, mempermalukan, atau menghancurkan seseorang.

Hal inilah menurut hemat saya, yang terjadi dengan kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis perempuan dengan kelompok-kelompok di masyarakat. Pendidikan atau sosialisasi mengenai pentingnya menghargai tubuh serta berhak untuk mengatur kesehatan dan hak reproduksinya. KB adalah hak individual perempuan. Bukan hak negara dalam mencampuri hak individual perempuan untuk mengatur kesehatan dan hak reproduksinya.

Selain itu juga, kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini perkosaan adalah bukan bentuk cinta. Melainkan serangan-serangan kepada tubuh perempuan tanpa izin atau *consent*. Oleh karenanya, harus dihentikan terjadi.

Menurut hemat saya, paparan konsep Young di atas menggambarkan apa yang dialami oleh upaya yang dilakukan oleh para aktivis perempuan dalam memahami, menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, yang langsung menghadapi tantangan dari mereka yang berkuasa. Hal ini pula yang saya hadapi melalui tiga kali pemanggilan oleh mereka yang berkuasa. Upaya untuk menunjukkan bahwa pada suatu kurun waktu tertentu, hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia telah diambil alih oleh Negara digunakan sebagai upaya pengendalian penduduk menunjukkan adanya penindasan dan pemaksaan.

Oleh karenanya, menunjukkan ketidakmampuan perempuan untuk menolak kondisi itu. Negara, tidak melihat atau tidak mau menerima adanya perbedaan pendapat dalam melihat sebuah situasi sosial yang ada. Dialog tidak terjadi, yang ada adalah praktik-praktik komunikasi satu arah dan dimulainya bentuk kekerasan, melancarkan dominasi penguasa.

Sangat menarik, bahwa para aktivis perempuan dan organisasi-organisasi perempuan selalu dapat mencari cara agar menyuarakan persoalan-persoalan perempuan sehingga ketidakadilan yang dialami para perempuan bisa mendapatkan perhatian semua pihak. Sebagai feminis, saya setuju dengan Sarah Ahmed dalam bukunya *Living a Feminist Life* bahwa semua tergerak menjadi feminis karena kita tergerak oleh sesuatu (Ahmed 2017). Sesuatu itu bisa merupakan rasa ketidakadilan yang membuat kita berpikir dan merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Agaknya, selama para pegiat isu perempuan baik para aktivis perempuan ataupun yang aktif memperjuangkan isu perempuan di tataran akademik, merasakan ada sesuatu yang salah, perempuan mengalami ketidakadilan, maka pemahaman akan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan akan selalu disuarakan hingga ada jalan keluar untuk mengatasinya.

Saya rasa, sekalipun ada keterbatasan ruang gerak berupa tindakan yang represif, seperti melakukan interogasi, melancarkan teror, dan ancaman, apabila mengenai ketidakadilan bagi perempuan lebih besar terasa. Rasa ini menjadi semacam bahan bakar bagi saya dan juga para kawan pegiat isu perempuan untuk terus bergerak dan bekerja hingga tercapai keadilan bagi perempuan dan kemanusiaan. Setidaknya, mengajak berbagai pihak dalam masyarakat untuk bergerak bersama mencapai keadilan bagi semua.

Penutup

Pengalaman penulis dalam menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan pada masa Orde Baru memperlihatkan bagaimana negara menggunakan kebijakan publik, termasuk program Keluarga Berencana, sebagai alat kontrol terhadap tubuh dan kehidupan perempuan. Negara, melalui aparatus kekuasaan dan ideologi pembangunan, menempatkan perempuan bukan sebagai subjek yang berhak menentukan nasibnya sendiri, melainkan sebagai objek kepentingan politik dan ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan autoetnografi feminis, artikel ini menunjukkan bahwa pengalaman

personal bukanlah sesuatu yang terpisah dari struktur sosial, tetapi justru menjadi pintu masuk untuk memahami relasi kuasa yang menindas. Melalui pengalaman interogasi, teror, dan pembungkaman, penulis mengungkap bagaimana bentuk kekerasan struktural hadir dalam kehidupan sehari-hari aktivis perempuan dan bagaimana perlawanan tetap dijalankan meski ruang gerak sangat terbatas.

Seperti yang dikatakan oleh Iris Marion Young, keadilan menuntut pengakuan terhadap perbedaan, bukan penyeragaman pengalaman. Sebagaimana Sarah Ahmed mengingatkan kita, feminisme lahir dari perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Selama rasa tidak adil itu masih nyata dirasakan oleh perempuan baik dalam kehidupan personal, keluarga, maupun dalam kebijakan negara, maka suara-suara perempuan akan terus mencari ruang untuk didengar dan diperhitungkan.

Penulis percaya bahwa meskipun represi dan ancaman berulang, keberanian untuk berbicara dan berjejaring tetap menjadi kekuatan utama dalam gerakan perempuan. Kisah ini bukan sekadar kilas balik masa lalu, melainkan juga pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan gender adalah proses yang terus berlangsung. Melalui ingatan, narasi, dan solidaritas, sejarah perempuan yang terpinggirkan akan terus ditulis ulang bukan sebagai korban, tetapi sebagai subjek perubahan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. 2017. "Living a Feminist Life", Duke University Press.
- Ellis, C. S. & Bochner, A. P. 2000. *Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject*. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), *The Handbook of Qualitative Research* (edisi ke-2). Sage.
- Ferguson, A. & Nagel, M. (eds.). 2009. "Dancing with Iris: The Philosophy of Iris Marion Young". Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195389128.001.0001>.
- Freire, P. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. Seabury Press. (atau edisi lainnya tergantung versi yang kamu pakai).
- Gordon, L. 1994. "Birth Control and Twentieth-Century Feminist Do: Feminism, Reproduction, and the Family," dalam Barrie Thorne dan Marilyn Yalom (penyunting), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*. Northeastern University Press: Boston.
- Hafidz, W. et al. 1991. "Family Planning Program in Indonesia: A Plight for Policy Reorientation", makalah untuk Konferensi Internasional NGO Forum on Indonesia. Washington DC.
- Harding, S. 2004. *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies*. Routledge.
- Kalyanamitra. 1992. One Day with Safari KB, Dokumenter Audio-

Visual. Kalyanamitra: Jakarta.

Smith, D. E. 1999. *Writing the Social: Critique, Theory, and Investigations*. University of Toronto Press.

Suryakusuma, J. I. 1996. "The State and Sexuality in New Order Indonesia", dalam Laurie J. Sears (penyunting), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Duke University Press: Durham.

Walby, S. 1991. *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell Ltd.: Oxford

Weil, S. 1990. *Essay on the Notion of Reading*. Philosophical

Investigations, 13(4), pp. 297–303. 2004.

Young, I. M. 1990. "Justice and the Politics of Difference", Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc4g4q>.

Young, I. M. 2004. *Five Faces of Oppression*. In L. M. Heldke & P. O'Connor (eds.), *Oppression, Privilege, and Resistance: Theoretical Perspectives on Racism, Sexism, and Heterosexism*. Boston: McGraw-Hill, pp. 37–65.

